



SMA

MAJU BERSAMA HEBAT SEMUA

MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SMA



**SMA, MAU DIBAWA
KE MANA?**





DAFTAR ISI

6



FOKUS

SMA, Mau Dibawa ke Mana?

Zaman terus berubah. Perubahannya telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Bagaimana pembinaan SMA ke depan?

4



BERITA DIREKTORAT

16



PROGRAM Profil Direktorat PSMA

20



KURIKULUM Mendorong Kemandirian SMA Melalui MBS

24



PESERTA DIDIK KKP: Membentuk Pola Pikir Pemimpin

28



KELEMBAGAAN SARPRAS Akreditasi Sekolah

32



SDM Reformasi Birokrasi

34



INOVASI Riset, Kompetensi Sosial dan Spiritual

36



KILAS SNMPTN: Jalur Kuliah Peserta didik Berprestasi

38



KOLOM Wajib Belajar 12 Tahun

40



MUDA Ananda Hafidh Rifai

42



CATATAN DARI CIPETE Menghadirkan Layanan Pendidikan Bermutu

43



INFO Informasi Peserta Didik

SMA Maju Bersama Hebat Semua | Media Komunikasi Membangun dan Memajukan SMA.

Pengarah : Purwadi Sutanto

Pemimpin Redaksi : Suhadi

Dewan Redaksi : Suharian, Juandailsyah, Hastuti
Mustikaningsih, Rakhmat Rakhmawan.

Redaktur Ahli : Agus Salim, Augustin Wardhani.

Redaktur Pelaksana : Jim Bar Pen

Redaksi : Nurul Mahfudi, Uce Verijanti, Wiwiet
Heriyanto, Tin Suryani, Muhammad
Adji SN, Akhmad Supriyatna, Aam
Masroni, Erik Herdian Karsana.

Desain dan Layout : Wahyu Akbar

Sekretariat Redaksi : Widya Hendriani

Direktorat Pembinaan SMA
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan.

☎ 021-75911532

Facebook Direktorat PSMA

Instagram direktorat.p sma

Twitter @dit_p sma

YouTube DITPSMA KEMDIKBUD

Website www.p sma.kemdikbud.go.id



Kompetensi Inti Hadapi Era Disrupsi

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si

Direktur Pembinaan SMA

Salam Sahabat SMA!

Pendidikan sekolah menengah atas sejatinya bertujuan mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki kompetensi akademik agar mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun, kompetensi akademik saja tidak cukup di tengah perkembangan zaman yang kini memasuki era disrupsi dan industri 4.0 dan bahkan lebih dari tantangan yang dihadapi generasi muda ke depan. Satu era yang dicirikan dengan terintegrasinya perangkat otomatisasi dengan internet dengan semua aktivitas manusia.

Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik SMA setidaknya ada tiga, yakni kompetensi karakter, kompetensi literasi, kompetensi akademik dan vokasi. Pendidikan karakter menjadi kompetensi dasar yang harus dikuatkan. Peserta didik SMA

adalah generasi yang memiliki integritas dan tangguh.

Kompetensi kedua adalah literasi. Literasi bukan sekadar baca tulis hitung, tetapi literasi tingkat tinggi dan mencakup berbagai sisi kehidupan. Apalagi sekarang sudah berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari literasi kehidupan, literasi budaya, literasi keuangan, literasi keluarga, hingga literasi lingkungan hidup. Dengan menguasai berbagai kompetensi tersebut akan membuat peserta didik literat.

Kompetensi ketiga adalah akademik dan vokasi. Untuk menghadapi jenjang pendidikan di tingkat perguruan tinggi kompetensi ini sangat menentukan. Karena itu peserta didik memiliki ruang dan waktu melakukan penguatan dan memupuk

kompetensi ini saat berada di jenjang sekolah menengah.

Layanan pendidikan SMA ke depan diharapkan dapat melahirkan lulusan yang akan hidup di zaman baru. Generasi yang memiliki kompetensi Abad ke-21, yakni berpengetahuan saja tidaklah cukup untuk bekal hidup. Selain karakter yang kuat dan berpengetahuan, lulusan SMA juga harus menguasai kemampuan yang dibutuhkan, yakni kemampuan komunikasi yang baik dengan warga dunia, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu membangun kolaborasi.

SMA,
Maju Bersama Hebat Semua...!



Gebyar Hardiknas 2019

Minggu, 28 April 2019, Direktorat Pembinaan SMA turut serta dalam memeriahkan Gebyar Hardiknas 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gebyar Hardiknas 2019 yang bertajuk "Harmoni Bersama Masyarakat" ini merupakan perayaan Hari Pendidikan Nasional bersama masyarakat berupa senam pagi bersama, jalan sehat bersama, berbagi dengan masyarakat dan panggung seni.

Turut hadir dalam acara Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, didampingi oleh Ditjen Dikdasmen dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. ●



Diseminasi Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA

Dalam rangka mensosialisasikan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMA melalui Subdit Program dan Evaluasi melaksanakan kegiatan Diseminasi di seluruh Indonesia yang di dilaksanakan sejak Bulan Mei sampai Bulan Juli 2019.

Dalam diseminasi ini, dipaparkan seluruh kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, Materi terkait dengan DAK Fisik Tahun 2019 dan DAK Non Fisik (BOS SMA Tahun 2019), selain itu juga disampaikan materi Kebijakan Dinas Pendidikan di masing-masing daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan Direktorat Pembinaan SMA tahun 2019 tersampaikan kepada unit terkecil dibawahnya. ●



ToT Bimbingan Teknis Penyusunan Soal HOTS

Bogor, 13-15 Juni 2019, Direktorat Pembinaan SMA melalui Subdit Kurikulum menyelenggarakan Training of Trainer Tim Fasilitator Bimbingan Teknis Penyusunan Soal HOTS di Arch Hotel, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk menelaah naskah soal berdasarkan sistematika dan kesesuaian isi dengan kebijakan landasan teori, kebutuhan sekolah, bahasa, dan pengetikan.

Output atas kegiatan ini adalah naskah final yang akan digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis dan sebagai bekal peserta ToT pada saat bertugas sebagai fasilitator bimbingan teknis.

Kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan naskah final yang akan digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis dan membekali peserta dengan tugas sebagai fasilitator pada saat pelaksanaan bimbingan teknis. Dalam acara yang berlangsung tiga hari ini menghadirkan pembicara dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Dr. Bahrul Hayat yang menyampaikan materi *Implementasi Higher Order Thinking Skills*. ●



TIM OLIMPIADE FISIKA INDONESIA
SAPU 5 MEDALI 3RD EUROPEAN PHYSICS
OLYMPIAD (EUPHO) 2019

Kontingen Indonesia Sabet Medali di EuPhO 2019

Riga, Republic Latvia 30 Mei-4 Juni 2019 Indonesia mengikuti *The 3rd European Physics Olympiad (EuPhO) 2019*. Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan lima orang delegasi yang merupakan peraih emas OSN.

EuPhO ketiga ini diikuti oleh 165 siswa yg berasal dari 35 negara, 28 diantaranya berasal dari Eropa dan tujuh negara dari luar Eropa. Tahapan tes dilakukan dalam dua gelombang, tes pertama adalah fisika eksperimen pada hari sabtu(1/6) dan tes kedua adalah fisika teori pada hari minggu (2/6) Masing-masing tes berlangsung selama lima jam dan keduanya diselenggarakan di kampus Universitas Latvia. Tidak sedikit siswa yang dibuat "KO" lebih dahulu oleh soal Fisika Eksperimen yang jumlah soalnya sebenarnya sangat sedikit, hanya satu halaman dengan lima soal.

Dalam perlombaan yang berlangsung selama lima hari tersebut, Indonesia berhasil membawa pulang lima medali, diantaranya satu emas yang diraih oleh Ivander Jonathan (SMA Mawar Sharon Christian, Surabaya). Dua medali perak yang berhasil diraih oleh Yuwanza Ramadhan (SMAN 1 Depok) dan Nixon Widjaja (SMAK IPEKA Plus Tengerang), dan dua medali perunggu yang diraih oleh Gusti Putu Surya Govinda (SMA Kesatuan Bangsa, DIY) dan Daffa Fathani Adilla (SMAN 8 Jakarta).

Kedatangan kontingen Indonesia disambut oleh Kasubdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMA, Suharnan didampingi oleh Kasi Kepribadian, Subdit Peserta Didik, Alex Firngadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. ●

BimTek Revitalisasi Pengelolaan Perpustakaan SMA

Bogor, 21-23 Mei 2019, Direktorat Pembinaan SMA melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan Bimbingan Teknis Revitalisasi Pengelolaan Perpustakaan SMA. Kegiatan ini diikuti oleh 99 pengelola perpustakaan SMA dari 34 provinsi. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada pengelola perpustakaan SMA agar mereka mampu menyelenggarakan, mengelola, dan memberikan pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Turut hadir dalam acara Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, dalam sambutannya beliau berpesan kepada para pengelola perpustakaan untuk mulai bergerak ke arah penyediaan dan pelayanan perpustakaan digital. Upaya yang sudah dilakukan adalah mengintegrasikan perpustakaan dengan Aplikasi SchILS (*School Integrated Library System*) yang dikembangkan oleh Perpustakaan Kemendikbud dan Pustekom. Purwadi juga menyampaikan, agar para pengelola perpustakaan tetap mengenal akar budaya dan mempraktekkan nilai-nilai luhur budaya dengan mempelajarinya melalui perpustakaan sekolah. ●





SMA Indonesia



SMA, Mau Dibawa ke Mana?

Zaman terus berubah. Perubahannya telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Bagaimana pembinaan SMA ke depan?

Bagaimana layanan SMA ke depan? Seperti apa layanan SMA ke depan? Pertanyaan demikian banyak ditujukan kepada pemerintah terkait layanan pendidikan menengah umum di masa yang akan datang. Wajar pertanyaan demikian diajukan mengingat perubahan zaman yang sangat drastis terjadi akhir-akhir ini. Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk, tak terkecuali dunia pendidikan. Bukan hanya itu, tuntutan perubahan adalah hal yang sangat mutlak dan tak bisa dielakkan.

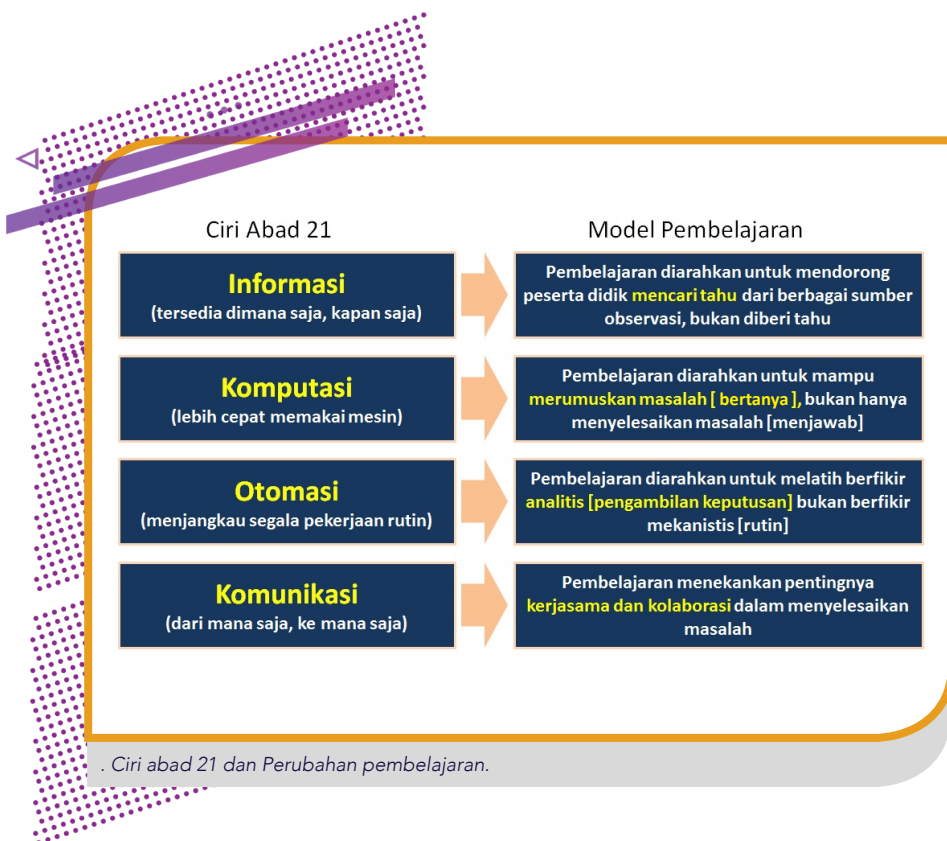
Era Industri 4.0 dan Era Konseptual

Layanan pendidikan SMA ke depan diharapkan dapat melahirkan lulusan yang akan hidup di zaman baru. Zaman baru itu kita kenal bersama sebagai era industri 4.0. Era industri ini dicirikan dengan terintegrasinya perangkat otomatisasi dengan internet dengan semua aktivitas manusia. Hampir tidak ada aktivitas kehidupan manusia yang tidak terintegrasi dengan internet. Hal demikian menuntut setiap orang memiliki kemampuan untuk hidup di zaman yang serba internet.

Dari sisi lain, abad ke-21 juga menunjukkan kecenderungan yang oleh Daniel Pink disebut sebagai era konseptual.

Mengapa disebut era konseptual? Karena terdapat enam hal utama yang mengalami pergeseran. Pertama, setiap benda tidak hanya dibutuhkan karena fungsinya, melainkan juga karena desainnya. Orang tidak hanya butuh kursi untuk duduk, melainkan kursi dengan desain yang menarik. Kedua, orang tidak hanya butuh argumen, tapi butuh cerita, kisah atau story yang menarik dan menyentuh hati. Ketiga, tidak semata fokus, orang juga harus membangun sebuah simponi bak orkestra. Keempat, tidak hanya perlu alasan logis, melainkan setiap orang juga memerlukan empati. Kelima, tidak hanya memerlukan hal yang serius, orang juga membutuhkan sebuah permainan yang menyenangkan. Keenam, orang tidak hanya membutuhkan akumulasi yang banyak melainkan membutuhkan makna dari apa yang dia kumpulkan. Inilah yang oleh Daniel Pink, disebut sebagai *"Six High-Concept And High-Tought Senses In The Conceptual Age"*.

Kondisi semacam itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak yang akan hidup di masa depan. Oleh karena itu, untuk bisa hidup di era industri 4.0 dan era konseptual, lulusan SMA harus menguasai kompetensi tertentu yang mendukung situasi dan kondisi di zaman tersebut. Kompetensi untuk mendukung kondisi tersebut disebut dengan "kompetensi abad 21".



No	PERUBAHAN
1	Guru dan Buku Teks bukan satu-satunya sumber belajar;
2	Kelas bukan satu-satunya tempat belajar;
3	Belajar dapat dari lingkungan sekitar;
4	Mengajak siswa mencari tahu, bukan diberi tahu;
5	Membuat siswa suka bertanya, bukan guru yang sering bertanya;
6	Menekankan pentingnya kolaborasi > Guru dan siswa adalah rekan belajar;
7	Proses nomer satu, hasil nomer dua;
8	Teaching > Tutoring;
9	Siswa memiliki kekhasan masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing.

Kompetensi abad 21 diidentifikasi sebagai kerangka kompetensi yang menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak lah cukup untuk bekal hidup. Selain karakter yang kuat dan berpengetahuan, lulusan SMA juga harus menguasai kemampuan yang dibutuhkan, yakni kemampuan komunikasi yang baik dengan warga dunia, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu membangun kolaborasi. Keempat kemampuan ini menjadi semacam kunci untuk dapat hidup di zaman tersebut.

Yang Berubah dalam Dunia Pendidikan

Memasuki abad 21, dunia dan aktivitas manusia dalam kehidupan sudah jauh berubah. Perubahan itu terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat. Informasi tersedia di mana saja dan mudah diakses. Informasi juga menyebar dengan cepat, luas, terbuka, dan seketika. Pekerjaan juga dilakukan dengan lebih cepat dengan mesin-mesin otomatis, dan menyebar secara luas. Interaksi

antarmanusia tidak lagi dibatasi kendala geografis dan waktu. Aktivitas manusia makin beragam dan berkembang, tuntutan terhadap kualitas pun makin tinggi.

“Kompetensi abad 21 diidentifikasi sebagai kerangka kompetensi yang menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak lah cukup untuk bekal hidup.”

Untuk memiliki kompetensi semacam itu, perlu dirancang suasana belajar dan proses pembelajaran yang sesuai. Maka, SMA sebagai satuan pendidikan umum, mutlak harus bisa menciptakan suasana dan memproses pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan zamannya. Suasana pada Abad 21 dicirikan

dengan empat fenomena yang terjadi.

Pertama, era informasi di mana informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Dengan perkembangan teknologi, informasi tersebut juga mudah diperoleh. Hal ini berakibat, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi.

Kedua, era komputasi di mana aktivitas manusia lebih cepat dilakukan dengan memanfaatkan mesin. Oleh karena itu pembelajaran bidang keterampilan yang sesuai dengan potensi anak akan menjadi salah satu cara untuk membuat peserta didik dapat memecahkan setiap persoalan hidupnya, dan salah satu solusinya melalui pemanfaatan mesin;

Ketiga, pekerjaan rutin dan berulang akan tergantikan dengan mesin-mesin otomatis atau piranti lunak dan aneka instrumen yang menggantikannya. Dengan demikian, maka pengembangan beragam aplikasi akan sangat berkembang luas. Industri pemrograman (*coding*) akan sangat dibutuhkan

dan berkembang sangat luas. Setiap peserta didik harus diarahkan pada kondisi demikian.

Keempat, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah di seluruh permukaan bumi, dari mana saja dan ke mana saja. Semua ini jelas mempengaruhi model pembelajaran.

Literasi dan Karakter

Atas dasar itulah, Direktorat Pembinaan SMA mendorong peningkatan mutu melalui penguatan proses pembelajaran agar sesuai dengan kondisi saat ini dan relevan dengan pencapaian kompetensi anak. Penggunaan perangkat digital merupakan salah satu wahana membiasakan anak berhubungan dengan dunia digital sekaligus menguatkan literasi digital. Hal ini pula membawa konseskuensi pada penguatan literasi dasar lainnya. Seperti literasi keuangan di mana mulai terjadi pergeseran dari transaksi konvensional ke *financial technology*. Demikian pula literasi dasar lainnya, seperti baca tulis, *numeric*, sains, dan literasi kewargaan.

Selain penguatan literasi, pendidikan karakter menjadi fokus penting yang menjadi pondasi bagi penguatan karakter peserta didik dalam menjalani kehidupannya. Penguatan karakter merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pendidikan karena pada hakekatnya pendidikan adalah penguatan karakter.

Pendidikan Kewirausahaan

Adalah fakta bahwa angka melanjutkan dari SMA ke perguruan tinggi masih berkisar 60% s.d. 70%. Selebihnya langsung terjun ke masyarakat atau bekerja. Dengan kenyataan demikian, maka harus diupayakan pembekalan bagi lulusan untuk memiliki kompetensi kerja dan kompetensi kemandirian yang sesuai. Atas dasar itulah maka program kewirausahaan di SMA diperlukan.

Melalui program kewirausahaan, diharapkan peserta didik memiliki mental wirausaha dan siap menjalani kehidupan nyata, baik ketika masuk ke dunia kerja maupun ketika berwirausaha sebagai pekerja mandiri. Dengan bekal kewirausahaan diharapkan anak dapat menjalani kehidupan dengan kemandirian.

“Penguatan karakter merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pendidikan, karena pada hakekatnya pendidikan adalah penguatan karakter.”

Mewujudkan Suasana Belajar Optimal

Selain mengoptimalkan proses pembelajaran, satuan pendidikan SMA juga didorong untuk terus menciptakan proses yang nyaman dan menyenangkan. Suasana sekolah terus diperbaiki. Kenyamanan dari aspek sanitasi dan lingkungan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas. Suasana lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan menjadi prasyarat optimalnya proses pendidikan. Mulai tahun 2019, sanitasi sekolah menjadi salah satu sasaran program pembinaan SMA.

Selain memperbaiki sanitasi sekolah seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan air kotor, tempat cuci tangan, toilet, kantin dan taman, tata kelola sanitasi juga menjadi perhatian. Demikian pula kehadiran perpustakaan yang diharapkan akan semakin baik dan menyenangkan bagi peserta didik.



Program Pembinaan SMA.



Mendorong akses

Selain aspek mutu, peningkatan partisipasi juga menjadi hal yang sangat penting. Saat ini dari 100 anak usia 16 s.d. 18 tahun tercatat baru sekitar 80 orang yang mengakses pendidikan menengah. Selebihnya belum tercatat sebagai peserta didik. Atas dasar itulah, maka upaya peningkatan kapasitas layanan untuk meningkatkan akses terus diupayakan.

Untuk daerah-daerah yang terkendala akses ke pendidikan menengah, diprogramkan pembangunan Unit sekolah baru (USB) bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, penguatan kemampuan sekolah untuk melayani peserta didik dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA. Bahkan, selain BOS Reguler, mulai 2019 juga digelontorkan BOS afirmasi untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan BOS Kinerja bagi sekolah yang dianggap memiliki kinerja baik. Dengan bantuan yang diberikan melalui dana transfer daerah ini, diharapkan sekolah memiliki kemampuan untuk melayani seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

Bahkan, untuk peserta didik dari golongan kurang mampu terus diberi dukungan melalui bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Manfaat PIP bukan hanya dinikmati oleh penegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), melainkan juga oleh pemegang kartu lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan), dan kartu lainnya, atau dianggap layak menerima manfaat PIP oleh sekolah.

Dengan dukungan kapasitas sekolah dan bantuan bagi peserta didik diharapkan partisipasi pendidikan menengah, khususnya SMA dapat terus meningkat.

Penguatan Tata Kelola

Salah satu bentuk peningkatan layanan pendidikan adalah dengan penguatan tata kelola pendidikan, baik tata kelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat satuan pendidikan.

Penguatan tata kelola pemerintah dilakukan dengan terus memperbaiki mekanisme pengelolaan. Sedangkan tata kelola satuan pendidikan terus didorong melalui penguatan otonomi sekolah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Manajemen tata kelola sekolah akan didorong dengan pola manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian, ketergantungan sekolah pada pemerintah diharapkan terus berkurang, sementara peningkatan partisipasi masyarakat akan terus meningkat. Partisipasi ini dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan mutu dan layanan serta pengawasan administratif dan pembelajaran.

Semua program itu bermuara pada upaya untuk menyiapkan lulusan SMA yang dapat hidup kompeten di zamannya. ●





Menyediakan Kemudahan Akses Bagi Semua

Berbagai program dan kegiatan terus dilakukan Pemerintah guna meningkatkan partisipasi pendidikan menengah, khususnya SMA.



Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Inilah amanat undang-undang. Hal ini berarti setiap warga negara, bagaimanapun kondisinya, di manapun ia berada, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi itu, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan bagi warga negara tanpa kecuali dengan berbagai cara.

Untuk mengukur partisipasi, selama ini digunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai salah satu penanda apakah warga negara sudah memanfaatkan haknya atas pendidikan atau belum. Angka APK pendidikan menengah merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah di satu wilayah (semua jenis pendidikan apakah SMA, MA, SMK, MAK, SMLB, dan Paket C) dibandingkan dengan penduduk usia 16 s.d. 18 tahun di wilayah yang sama.

APK 60% di daerah A misalnya, bermakna terdapat 60 peserta didik di satuan pendidikan menengah di daerah A, sementara penduduk usia 16 s.d. 18 tahun di wilayah tersebut berjumlah 100 orang. Angka APK ini bisa saja melampaui 100% manakala dari jumlah peserta didik, terdapat yang usianya di bawah 16 tahun atau di atas 18 tahun, atau terdapat peserta didik yang berasal dari luar wilayah. Makanya disebut partisipasi kasar. Yang lebih fokus sebenarnya indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Di mana jumlah siswa yang dihitung adalah siswa berusia 16 s.d. 18 tahun dibandingkan dengan penduduk usia yang sama di wilayah yang sama.

Namun secara umum, indikator APK lah yang menjadi parameter utama untuk memotret partisipasi. Berdasarkan potret itu, pemerintah akan melakukan intervensi ke daerah-daerah dengan APK rendah.

1. Upacara sumpah pemuda di SMAN 71 Jakarta
2. Peserta didik Penerima bantuan PIP di Sumatera Barat.
3. SMAN 5 Sekadau Hilir, Kalimantan Barat, Bangunan Unit Sekolah Baru yang dibangun atas Bantuan Pemerintah Pusat.
4. Bangunan Ruang Kelas Baru SMAN 5 Jayapura, Papua, diharapkan menambah daya tampung.

Terutama untuk daerah dengan APK di bawah 55%. Adapun bentuk intervensi dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Peningkatan Kapasitas Daya dukung

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi adalah dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung satuan pendidikan. Di daerah yang tidak ada layanan satuan pendidikan diberi bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) bagi pemerintah daerah setempat atau pihak lain yang memenuhi syarat. Syarat utama yang dibutuhkan bagi penerima bantuan adalah kepemilikan lahan dan potensi input peserta didik. Dengan bantuan USB tersebut diharapkan di daerah tersebut terdapat tambahan kapasitas dan daya dukung untuk melayani pendidikan menengah. Satu unit USB dibangun biasanya terdiri atas tiga ruang kelas, perpustakaan, lab, kantor, toilet dan gudang.

Selain bantuan USB, pemerintah juga memberikan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menambah kapasi-

tas. Dengan ruang kelas baru ini maka daya tampung satuan pendidikan dapat meningkat. Sehingga dapat meningkatkan daya tampung peserta didik.

Dua jenis bantuan ini yang secara langsung ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan di setiap wilayah. Dengan bantuan ini pula diharapkan angka APK akan meningkat dan layanan pendidikan menengah lebih merata.

Penguatan Layanan

Selain melalui bantuan penyediaan prasarana, peningkatan akses juga didorong melalui penguatan layanan oleh satuan pendidikan. Penguatan salah satunya melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA. Bantuan ini diberikan dengan tujuan antara lain meringankan beban peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan. Melalui BOS sekolah memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan pendidikan, khususnya dalam pembiayaan operasional. Di sisi lain, masyarakat yang kurang mampu juga memiliki keberanian untuk meng-

akses pendidikan, karena adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah tersebut.

Peningkatan akses juga didorong melalui bantuan sosial langsung kepada peserta didik tidak mampu. Untuk membiayai pendidikan, khususnya komponen biaya pribadi, pemerintah menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP), berupa bantuan dana langsung kepada peserta didik. Bahkan manfaat PIP bukan hanya dinikmati oleh pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) melainkan juga pemegang kartu lainnya seperti PKH atau mereka yang diusulkan oleh sekolah. Manfaat PIP dapat diperoleh setelah sekolah menceklist "layak PIP" pada data siswa di Dapodik.

Melalui program-program inilah, diharapkan partisipasi pendidikan menengah dapat terus meningkat, sehingga warga negara dapat mengalami proses peningkatan kompetensi melalui pendidikan untuk dapat menjalani kehidupan di zamannya dengan sukses. ●





Kuncinya Pada Proses Pendidikan

Dunia yang berubah, menyebabkan layanan pendidikan pun berubah. Bagaimana mengupayakan layanan SMA yang bermutu? Sepenuhnya bergantung pada mutu proses pendidikan.

Seperti apakah SMA yang bermutu? Pertanyaan singkat ini memerlukan jawaban yang sangat panjang lebar dan komprehensif. Sangat tidak mudah. Akan tetapi, inilah yang menjadi fokus program Direktorat Pembinaan SMA.

Jika mengacu pada makna pendidikan, sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, hasil dari proses pendidikan adalah peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila peserta didik ketika lulus memiliki keenam hal tersebut, maka itulah hasil pendidikan bermutu. Akan tetapi untuk mengukur profil lulusan sesuai amanat UU tersebut, tentunya bukan hal yang mudah, memerlukan indikator yang kompleks dan jangka panjang.

Hasil pendidikan yang bermutu sangatlah tergantung pada proses pendidikan bermutu. Dengan demikian, maka mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan proses pendidikan menjadi fokus dalam program menuju SMA yang bermutu.

Keenam hasil pendidikan tersebut sifatnya sangat mendasar, mengingat unsur utamanya berupa karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan hal yang sangat mendasar dalam dunia pendidikan. Tanpa karakter yang baik, penguasaan kompetensi apapun tidak akan memberi makna. Tanpa karakter yang baik, literasi tidak terwujud dengan baik.

Dengan landasan tersebut, maka perbaikan proses pendidikan difokuskan pada penguatan karakter, pen-

capaian kompetensi dan literasi peserta didik. Bagaimana proses dilakukan? Terdapat dua komponen penting. Proses pendidikan bermutu apabila di tiap satuan pendidikan tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran yang sangat kondusif untuk berkembangnya potensi peserta didik.

Suasana belajar dapat berupa suasana lingkungan, interaksi antarindividu, dan interaksi antara individu dan lingkungan. Apabila suasana terbangun dengan baik dan menuju suasana belajar ideal, maka hal itu merupakan salah satu faktor proses pendidikan yang baik. Bayangkan lingkungan sekolah dengan sanitasi yang buruk, misalnya, proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Demikian pula di zaman *internet of things* ini sekolah tidak memanfaatkan teknologi informasi, maka proses pendidikan tidak berlangsung efektif. Atau tatkala interaksi antara guru dipenuhi dengan hubungan yang tidak harmonis, maka proses pembelajaran juga tidak akan berjalan. Demikian pula ketika lingkungan sekolah tidak dirawat dengan baik, tidak ada interaksi positif antara orang dan lingkungan, suasana itu tidak akan membuat peserta didik semangat mengembangkan potensi dirinya. Ujungnya tidak membuat peserta didik kompeten hidup di zamannya. Bagaimanapun juga suasana belajar itu merupakan prasyarat bagi efektifitas pendidikan.

Komponen kunci proses pendidikan yang kedua adalah terjadinya proses pembelajaran secara optimal. Di sinilah perlu di lihat apakah setiap proses pembelajaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara konsisten, dilakukan penilaian optimal dan dievaluasi secara terus menerus.

Dua komponen kunci itu menjadi faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Jika dua komponen ini tidak berjalan baik, maka hasil pendidikan yang diharapkan tidak akan tercapai. Kunci dari keterlaksanaan sebuah proses adalah faktor manusianya. Oleh karena itu guru dan tenaga kependidikan yang bermutu akan menjadi penentu proses pendidikan yang bermutu. Dan proses pendidikan yang bermutu akan menjadi penentu hasil pendidikan yang bermutu.

Apakah guru dan tenaga kependidikan kita sudah bermutu? Tentu bukan hanya guru dengan kompetensi pedagogik dan profesional yang mumpuni, melainkan yang lebih penting adalah guru dengan kompetensi pribadi yang baik dan tampil sebagai teladan berintegritas, serta guru dengan kompetensi sosial yang baik, yang membangun hubungan sosial antarmanusia terutama dengan peserta didik secara baik. Pertanyaan ini perlu kita jawab bersama dengan menjadikan pribadi kita sebagai murid pertama dari upaya peningkatan kualitas pribadi. Dengan prasyarat ini, maka pendidikan bermutu bisa diraih. ●



“Dua komponen kunci itu menjadi faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Jika dua komponen ini tidak berjalan baik, maka hasil pendidikan yang diharapkan tidak akan tercapai.”





PROFIL DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Maju Bersama Hebat Semua

Direktorat Pembinaan SMA bertekad menjadi lembaga kebijakan dan standardisasi teknis yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mewujudkan layanan prima dan terpercaya di bidang pendidikan SMA di Indonesia.

Sampai tahun 2019, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 13.693 sekolah. Tersebar di se-antero wilayah Indonesia. Data PDSPK tahun 2017-2018 dan Dapodik, Februari 2019, sebanyak 811 sekolah berstatus negeri dan sebanyak 882 berstatus swasta.

Masih berdasarkan Dapodik, sekolah yang tersebar di 34 provinsi tersebut baru sebanyak 5.621 sekolah yang sudah memenuhi akreditasi A, sebanyak 4.479 terakreditasi B, dan sebanyak 1.472 terakreditasi C. sedangkan sisanya belum terakreditasi.

Kondisi tersebut hanya secuil gambaran besarnya tantangan yang dihadapi dalam memajukan pendidikan di Tanah Air, khususnya jenjang SMA. Nyatanya betul

bahwa, sampai hari ini masih banyak hal yang mesti diurus dan dibenahi apabila ingin mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang jelas-jelas menyebutkan, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (Direktorat PSMA) merupakan direktorat teknis yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang di bawahnya terdapat Direktorat PSMA.

Sebagai direktorat teknis, Direktorat PSMA menjalankan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PSMA menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas.

Direktur Pembinaan SMA Purwadi Sutanto menegaskan, misi pendidikan SMA lebih diarahkan kepada usaha meningkatkan mutu sekolah dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, terutama bagi siswa kurang beruntung agar dapat mengakses layanan pendidikan bermutu dengan mengoptimalkan peran serta ekosistem pendidikan SMA dengan prinsip gotong-royong. "Upaya-upaya ini akan kita lakukan secara terus menerus dan bertahap," ujar Direktur

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan misi tersebut, Direktorat PSMA melakukan beberapa upaya, antara lain dengan menyediakan prasarana akses melalui penyediaan unit sekolah baru dan ruang kelas baru bagi daerah yang masih membutuhkan layanan pendidikan SMA. Seiring dengan itu, Direktorat PSMA juga berupaya meningkatkan keterjangkauan layanan SMA, meningkatkan kualitas sarana melalui penyediaan laboratorium dan peralatan TIK.

Upaya berikutnya adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pengembangan model-model pembelajaran sekaligus mengembangkan karakter dan kreativitas siswa melalui kompetensi keilmuan nasional-internasional serta kompetisi olahraga dan seni.

Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan SMA

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan sekolah menengah atas. Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola SMA
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola SMA
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik SMA
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan SMA
5. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan SMA yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing
6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu SMA
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola SMA
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola SMA
9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola SMA; dan / pelaksanaan administrasi Direktorat.

Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan SMA

1. Peningkatan kapastian akses pendidikan SMA yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
2. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan SMA yang berorientasi pada pembentukan karakter
3. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.





SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran, kerja sama, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta laporan Direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi terdiri atas:

- A. Seksi Program, melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan SMA.
- B. Seksi Evaluasi, memantau dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan SMA, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan SMA, dan penyusunan laporan Direktorat.

SUBDIREKTORAT KURIKULUM

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum SMA

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas:

- A. Seksi Pembelajaran, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran SMA
- B. Seksi Penilaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian SMA.

SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan SMA yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana SMA.

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- A. Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan SMA yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga



asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola SMA

- B. Seksi Sarana dan Prasarana, melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana SMA.

SUBDIREKTORAT PESERTA DIDIK

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik SMA

Subdirektorat Peserta Didik Terdiri Atas:

- A. Seksi Bakat dan Prestasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik SMA

- B. Seksi Kepribadian, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik SMA.

SUBBAGIAN TATA USAHA

Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat. ●

1. Struktur Organisasi Direktorat PSMA tahun 2019
2. Gedung kantor Direktorat PSMA di Cipete, Jakarta Selatan
3. Tim Direktorat Pembinaan SMA.



MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Mendorong Kemandirian SMA Melalui MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu model manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah mendorong sekolah untuk mandiri dan memanfaatkan konteks lokal.

Era perubahan di tanah air sudah menyentuh berbagai bidang kehidupan, termasuk di sekolah. Saat ini sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar mengajar di mana guru dan siswa berinteraksi untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah ditetapkan. Menengok ke belakang. Dulu, warga sekolah, baik kepala sekolah dan guru memiliki pandangan dalam mengelola sekolah harus sesuai dengan arahan dan kebijakan instansi di atasnya. Walhasil, lahir sekolah yang kurang kreatif dalam menciptakan pola belajar mengajar dan kurang melibatkan masyarakat. Namun kini sekolah didorong menjadi lembaga yang mandiri baik dalam pengelolaan maupun metode pembelajaran serta harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat.

Upaya mendorong sekolah menjadi lembaga yang mandiri dalam pengelolaannya, merupakan model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dirasa memiliki banyak manfaat. Langkah ini juga merupakan reformasi di bidang pendidikan karena semua pihak bersama-sama terlibat dalam rencana pengembangan sekolah sesuai dengan karakteristik daerah serta kebutuhan peserta didik.

Pertanyaan kemudian muncul, mengapa sekolah yang merupakan lembaga khusus (formal) sebagai penyelenggara pendidikan, harus dikelola dengan sebaik-baiknya? Manajemen pendidikan dan lembaga mutlak dilakukan karena hal tersebut mencerminkan keunggulan sekolah. Manajemen atau pengelolaan sekolah merupakan komponen integral

yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Akan tetapi tampaknya, masih banyak sekolah yang diurus tanpa manajemen pendidikan. Sekolah berjalan apa adanya, tanpa perencanaan, jangka pendek, menengah apalagi jangka panjang. Proses pembelajarannya pun terseok-seok seperti akar tumbuh di batu. Guru-guru yang tidak berkompeten dalam bidangnya dan kualifikasi akademik yang tidak memadai, masih banyak ditemukan di sekolah. Belum lagi jika ditinjau dari kompetensi lulusannya yang tidak mampu bersaing di tengah-tengah kehidupan global karena tidak sesuai apa yang diajarkan dengan kebutuhan di masyarakat. Inilah sekelumit problem yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menawarkan suatu pencerahan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih menekankan keleluasaan pada sekolah untuk mengelola pendidikan secara lebih mandiri.

Munculnya Konsep MBS

Latar belakang munculnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tak lepas dari kinerja pendidikan suatu negara berdasarkan sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Di Hongkong misalnya, kemunculan MBS dilatarbelakangi kurang baiknya sistem pendidikan saat itu, yaitu antara tahun 1960-an hingga 1970-an. Berbagai inovasi dilakukan melalui pengenalan kurikulum baru dan pendekatan metode pengajaran baru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya dianggap kurang maksimal. Demikian juga di banyak negara lain seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, Selandia Baru dan Indonesia.

Bersamaan dengan berbagai upaya itu, pada tahun 1980-an terjadi perkembangan yang menggembirakan di bidang manajemen modern, yaitu atas keberhasilan penerapannya di industri dan organisasi komersial. Keberhasilan aplikasi manajemen modern itulah yang kemudian diadopsi untuk diterapkan di dunia pendidikan. Sejak saat itu masyarakat mulai sadar bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu melompat atau keluar dari lingkup pengajaran di dalam kelas secara sempit ke lingkup organisasi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem secara struktural dan gaya manajemen sekolah.

Setelah adanya kesadaran itu muncullah berbagai gerakan reformasi seperti gerakan sekolah efektif (*effective school*), gerakan anggaran sekolah mandiri (*self-budgeting school*), pengembangan kurikulum berbasis sekolah (*school-based curriculum development*), pengembangan staf berbasis sekolah (*school-based staff development*) dan bimbingan siswa berbasis sekolah (*school-based student counseling*). Gerakan reformasi yang menggunakan pendekatan berbeda-beda tersebut kemudian melahirkan model-model MBS.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sendiri merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan keleluasaan dan otonomi luas pada tingkat sekolah untuk mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Di samping, memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki kinerja sekolah yang mencakup pimpinan sekolah, guru, siswa, orangtua siswa dan masyarakat. Sehingga sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan ke depan.

Menurut Sagala Syaiful, penulis buku "Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat", ada ciri-ciri MBS yang lebih mendalam lagi, yakni :

1. Memiliki *output* (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif) sebagaimana diharapkan
2. Efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi
3. Para kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyeraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia.
4. Lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman (*enjoyable learning*) sehingga manajemen sekolah lebih efektif
5. Analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, dan imbal jasa tenaga kependidikan dan guru sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik
6. Pertanggung jawaban (akuntabilitas) sekolah kepada publik terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan, dan
7. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepenuhnya dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan riil.



1. Kegiatan upacara bendera di sekolah

Manfaat MBS

Dalam pelaksanaannya, MBS bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan ia sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang bermutu. Secara lebih konkret, MBS merupakan suatu cara atau teknik untuk menciptakan suasana nyaman bagi siswa di sekolah baik dari sisi tenaga pengajar maupun suasana lingkungan. menjadikan siswa belajar dalam kondisi yang menyenangkan, kreatif, inspiratif dan menantang.

Dalam konteks yang lebih luas, terdapat banyak dampak positif dari penerapan MBS di sekolah, jika memang dijalankan dengan benar. Beberapa manfaat nyatanya adalah: (1) menjamin mutu pembelajaran peserta didik yang berpijak pada asas pelayanan dan prestasi hasil belajar, (2) meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan membangun karakter bangsa yang berbudaya (3) meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreativitas, inisiatif, dan inovatif dalam mengelola serta memberdayakan sumber daya sekolah (4) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi bersama (5) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah dan (6) meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan pengelolaan sekolah oleh semua unsur yang terkait mengacu pada standar pendidikan nasional.

Praktek MBS di SMA Indonesia

MBS di Indonesia diawali dengan lahirnya istilah Otonomi Daerah. Saat datang era reformasi, terjadi perubahan di beberapa bidang kehidupan, politik, moneter, hukum sampai kepada bidang pendidikan. Konsekuensi dari perubahan tersebut di antaranya melahirkan UU No. 22 Thn 1999 Tentang Otonomi Daerah, serta UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. UU tersebut mengakibatkan kewenangan bagi daerah untuk mengurus sejumlah potensi daerahnya termasuk pendidikan. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan pendidikan berada di bawah kewenangan daerah kabupaten / kota atau yang disebut sebagai desentralisasi pendidikan.

Di sinilah signifikansinya pemerintah daerah mengurus pendidikan disebabkan setiap daerah memiliki potensi wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika, manajemen atau lebih tepatnya kebijakan pendidikan yang diperankan oleh pemerintah daerah baik dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada, maka peluang pendidikan untuk maju semakin besar.

Terkait dengan penerapan MBS di sekolah, termasuk di jenjang SMA, memang belum ada bentuk atau pedoman yang baku. Sepanjang prinsip-prinsipnya dijalankan, pihak sekolah boleh saja mencari konsep yang tepat sesuai dengan kebutuhan setempat. Intinya adalah dalam pengembangan sekolah harus transparan serta melibatkan seluruh komponen, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto. "Ki Hadjar Dewantara sudah mengajarkan kepada kita tentang tripusat pendidikan, di mana tanggung jawab pendidikan berada di tangan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh sebab itu, sekolah harus lebih aktif menyampaikan kegiatan sekolah melalui berbagai media, termasuk media sosial," katanya.



Keaktifan sekolah memberikan informasi kepada orangtua atau keluarga dan masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, dimaksudkan agar semua pihak mengetahui dengan jelas apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah untuk para peserta didik. Penyampaian informasi tentang kegiatan sekolah juga dimaksudkan untuk menguatkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Menurut Purwadi Sutanto, MBS pada dasarnya adalah pengambilan keputusan secara partisipatif. Melalui MBS, orangtua dan masyarakat disertakan untuk aktif di dalam pengambilan keputusan di sekolah serta aktif membantu sekolah mencapai delapan standar nasional pendidikan.

“MBS pada dasarnya adalah pengambilan keputusan secara partisipatif. Melalui MBS, orangtua dan masyarakat disertakan untuk aktif di dalam pengambilan keputusan di sekolah serta aktif membantu sekolah mencapai delapan standar nasional pendidikan.”

Tentang penerapan sistem MBS di SMA, banyak contoh pengalaman yang dapat dijadikan panduan bagi sekolah lain. Salah satunya adalah SMAN 1 Sampang Madura. Sekolah yang berdiri pada tahun 1965 ini sudah menerapkan sistem MBS sejak 2006 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tuntutan zaman. Penerapan pola MBS ini dengan membentuk kelompok musyawarah guru, sehingga kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan aklamasi manajemen sekolah. Di samping itu, ketika muncul



persoalan dan solusi, yang pertama kali dilakukan adalah menyampaikan ke Kepala Sekolah untuk kemudian didiskusikan. Keputusan menentukan jumlah dan besarnya sumbangan pendidikan siswa, misalnya, merupakan hal yang diutamakan untuk didiskusikan bersama agar tidak muncul intervensi dari pihak luar. Begitu pula halnya dengan proses seleksi penerimaan siswa baru. Karena SMAN 1 Sampang, Madura telah menjadi sekolah rujukan, tentu banyak peminatnya. Sejak awal pihak sekolah dengan dukungan komite sekolah memiliki komitmen kuat untuk memiliki independensi dalam hal penerimaan siswa baru. Artinya, hanya menerima siswa sesuai dengan hasil penjurangan PPDB secara online dan menolak segala bentuk “titipan.”

Masalah “titipan” merupakan persoalan klasik dan sekolah tertentu bisa jadi masih belum berani mengambil sikap karena berbagai alasan. Sebenarnya hal ini terpulang kepada gaya kepemimpinan pemilik sekolah atau pimpinan sekolah bagaimana mereka menentukan arah dan tujuan bagi pengembangan sekolahnya.

2. Kegiatan upacara bendera di sekolah
3. Interaksi antara guru dan siswa di kelas
4. Deretan piala yang diraih oleh sekolah

Direktorat Pembinaan SMA sendiri terus berupaya mengenalkan MBS kepada SMA-SMA di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2018, sudah menelurkan buku MBS yang menyajikan MBS secara teoritis dan gaya manajemen sekolah terpilih di 34 provinsi di Indonesia. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi sekolah yang belum menerapkan MBS seutuhnya. Ini juga merupakan bukti dari keseriusan bahwa manajemen sekolah mendapat perhatian penuh dari Direktorat Pembinaan SMA untuk keberlangsungan dan mutu SMA yang lebih baik di masa mendatang. ●

Kawah Kepemimpinan Pelajar: Membentuk Pola Pikir Pemimpin

Mengulang sukses pada tahun sebelumnya, tahun ini Direktorat Pembinaan SMA kembali melaksanakan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) yang diikuti oleh Pengurus dan Pembina OSIS dari 34 provinsi di Indonesia.

Bogor, 29 April-4 Mei 2019
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMA kembali melaksanakan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) di Green Forest Hotel, Bogor. Acara yang berlangsung enam hari itu diikuti oleh pengurus dan Pembina OSIS dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi diwakili oleh delapan siswa (empat siswa putra dan empat siswa putri).

Senin (29/4), Acara dibuka secara resmi oleh Drs. Purwadi Sutanto M.Si (Direktur Pembinaan SMA), turut mendampingi para Kasubdit dan Kasi di Lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Dalam sambutannya, Purwadi mengajak para siswa untuk menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing dalam menghadapi era milenial yang semakin digital. "Saya melihat wajah-wajah penuh optimisme dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Di sini tempat kalian dibina menjadi agen-agen perubahan yang hebat calon pemimpin masa depan yang siap bersaing menuju abad ke 21". Jelas Purwadi.

Selain itu, Kasubdit Peserta Didik Direktorat PSMA, Juandanilisyah,

menjelaskan tujuan KKP adalah untuk membentuk pola pikir pemimpin muda yang berkarakter mulia, patriotik, dan berdaya guna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Pada acara ini, peserta akan mengikuti lima rangkaian kegiatan utama dalam hal penggemblengan diri yaitu Kawah Kepemimpinan, Kawah Kedisiplinan, Kawah Kebangsaan, Kawah Kreativitas, dan Kawah Kepedulian. Lima rangkaian kegiatan tersebut dikemas dalam beberapa materi yang disampaikan langsung oleh profesional di bidangnya.

Pada hari kedua (30/4), Peserta mendapat materi mengenai Pembuatan Berita dan Artikel serta Pengaplikasiannya dalam gawai yang disampaikan oleh jurnalis, materi Bela Negara yang disampaikan secara panel oleh BNN dan Kepala Arsip Nasional RI. Selain materi secara teoritis, peserta juga didorong untuk dapat kritis dan diwadahi dalam kegiatan Forum Debat Kelompok. Mengingat peserta merupakan pengurus OSIS, dalam acara ini juga diberikan materi berupa Pelatihan Manajemen OSIS, diharapkan dengan mendapat materi ini peserta dapat membawanya sebagai oleh-oleh ketika



kembali ke sekolah dan diaplikasikan di sekolahnya masing-masing.

Selain peserta, pendamping juga mendapat materi dalam bentuk *Focused Group Discussion* (FGD) mengenai kegiatan kesiswaan (OSIS, MPLS, Problematika Remaja, Pengembangan Kreativitas, dsb).

Kunjungan ke Kebun Raya Bogor

Pada hari ke-3 kegiatan KKP (1/5), peserta berkesempatan mengunjungi Kebun Raya Bogor. Di sana peserta dapat melihat beragam tanaman dan menikmati suasana sejuk khas Kota Bogor, kegiatan ini merupakan bagian dari rekreasi peserta setelah sebelumnya berkulat dengan berbagai materi dalam acara KKP. Khususnya, dalam kesempatan tersebut mereka dapat bertemu langsung dengan sosok pemimpin muda inspiratif yaitu Bima Arya (Walikota Bogor).

Sambutan baik dan antusias diperlihatkan oleh Bima Arya ketika bertemu dengan 272 peserta dari seluruh Indonesia. Kesempatan bertemu dengan Bima Arya pun tidak disia-siakan oleh peserta KKP. Banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada Bima Arya mengenai kepemimpinan. Salah satunya Jovanka, siswa asal SMA Taruna Nusantara, Magelang yang bertanya mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh Bima Arya. "Menjadi pemimpin harus meletakkan sikap jujur di atas banyak hal. Memimpin itu adalah ajang untuk kita mewujudkan tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Niatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan diri sendiri" jawab Arya.

Melengkapi keseruan hari itu, peserta juga diajak memainkan *games* oleh fasilitator. *Games* yang dimainkan adalah *games* menarik bertemakan kebangsaan dan kepemimpinan. Melalui *games* ini peserta diajak dapat saling bersinergi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Bertemu Mendikbud

Hal langka yang juga didapat oleh peserta KKP adalah bertemu dengan Bapak Muhadjir Effendi (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Dalam rangka Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (2/5), seluruh peserta KKP mengikuti Upacara Hardiknas di Lapangan Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Selesai upacara, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta, Mendikbud akan melaksanakan audiensi dengan seluruh peserta di Aula Kemendikbud.

Audiensi yang berjalan kurang lebih satu jam itu tentu membawa manfaat dan memberikan wawasan baru untuk peserta. Selain mendengarkan ceramah Mendikbud, dalam audiensi itu juga peserta dapat berinteraksi langsung dengan Mendikbud.



1. Peserta KKP mengikuti acara dengan penuh semangat
2. Ekspresi salah satu peserta KKP saat mengikuti games
3. Seluruh peserta foto bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan

Dalam audiensi itu, Mendikbud berpesan agar para siswa membangun mimpi yang besar untuk menggapai cita-cita dan menjalin komunikasi dengan sesamanya melalui jejaring alumni KKP. "Bermimpilah selama mimpi itu tidak dilarang. Tidak ada yang melarang saudara menjadi presiden, pengusaha, guru dan lainnya. Manfaatkan sebaik mungkin pengalaman Anda selama berada disini dan bertemu dengan teman sebaya dari seluruh daerah di Indonesia. Ini adalah momentum yang tidak terjadi setiap saat dan dialami oleh orang banyak. Bangunlah jejaring diantara kalian dan peliharalah itu sampai nanti kalian sukses di bidangnya masing-masing. Jejaring inilah sangat penting untuk membangun kesuksesan kalian dan Indonesia kedepan" Pesan Mendikbud.

Seorang yang bercita-cita menjadi pemimpin dimanapun, jika tidak memiliki jaringan yang kuat dan hubungan yang baik dalam pergaulan sehari-hari maka tidak dapat menghasilkan kinerja dan prestasi yang baik. Oleh karena itu manfaatkan betul pertemuan ini untuk membangun jaringan masa depan anda dan jadikan ini rencana jangka panjang 20 hingga 30 tahun ke depan. Di usia anda 30, 40, dan 50 tahun nanti jadikan diri anda bermanfaat di segala lini kehidupan yang sesuai bidang yang anda minati. "Tanamkan dalam diri anda bahwasannya saya adalah pemimpin, sehingga pemahaman ini terus melekat dalam diri anda dan memberikan pengaruh positif dalam kepribadian kalian.



4 & 5. Ekspresi peserta KKP saat bermain games kelompok dan perorangan

Sejak dari sekarang, kalian tanamkan sikap seorang pemimpin yang anti korupsi bukan hanya soal materi, tapi kejujuran yang anda tanamkan dalam segala hal akan membantu anda menjadi pribadi yang baik serta terhindar dari perilaku menyimpang. Di tangan kalianlah Indonesia akan jauh lebih baik jika kepribadian yang baik pun sudah Anda tanamkan sejak sekarang. Saya optimis ditangan kalian semua generasi tahun 2045, Indonesia akan jauh lebih hebat dibandingkan sekarang ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional, teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia.” Tutup Mendikbud diakhir sambutannya.

Seusai mengikuti upacara dan audiensi dengan Mendikbud, seluruh peserta mendapat kesempatan untuk melakukan kunjungan ke Monumen Nasional (Monas). Ada yang spesial untuk kunjungan Monas kali ini, seluruh peserta diajak oleh panitia untuk pergi ke Monas menggunakan MRT dan bus transjakarta, tentu ini adalah pengalaman baru, apalagi untuk peserta yang berasal dari daerah, mereka memiliki kesempatan untuk mencoba moda transportasi di ibukota.

“Terimakasih atas ilmunya, dan jujur kami peserta sangat membutuhkan hal

hal seperti ini, karena dengan kegiatan seperti ini insyaAllah kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari hari, baik pribadi ataupun golongan” ujar Muhammad Gusnal Umar peserta asal SMAN 1 Tilamuta, Gorontalo.

Berbagi Peduli dengan Sesama

Salah satu materi dalam KKP ini adalah Kawah Kepedulian. Pada Kawah Kepedulian ini peserta diajarkan untuk peduli pada sesama dan dapat ringan tangan dalam membantu sesama yang lebih membutuhkan. Materi ini tidak hanya diberikan dalam hal teori, tetapi juga seluruh peserta mempraktkannya langsung dalam kegiatan berbagi.

Hari ke lima Kegiatan KKP (3/05) peserta KKP melakukan aksi kepedulian di Mahad Nurul Fata dan Pondok Pesantren An Nur Litahfidzilqur’an yang keduanya berlokasi di Bogor Selatan. Kedatangan peserta KKP disambut meriah dan antusias oleh santri dan asatidz di kedua pondok pesantren. Pada kesempatan tersebut, peserta KKP menyerahkan santunan berupa uang, sembako, buku-buku pelajaran, dan alat kebersihan.

“Kami sangat berterimakasih kepada seluruh pengurus, santriwan dan santri-

wati dipesantren ini yang telah menerima kami dengan sangat baik. Mungkin apa yang kami berikan ini tidak begitu besar, namun hal yang lebih penting dari pertemuan ini adalah niat ikhlas untuk membantu pesantren ini dan menjalin silaturahmi serta ukhwah antar kita agar selalu dirahmati Allah SWT.” Ujar Ariq Naufal perwakilan peserta KKP asal DKI Jakarta.

Kegiatan sosial ini juga merupakan kegiatan terakhir yang dalam rangkaian kegiatan KKP yang dilaksanakan sejak tanggal 29 April. KKP ditutup oleh Kasubdit Peserta Didik, Juandanislyah didampingi Kasi Kepribadian, Alex Firngadi dan Penanggungjawab KKP, Sulaksono. Sebelum ditutup secara resmi, seluruh peserta dikukuhkan ditandai dengan penyematan pin dan prosesi cium bendera sebagai simbol Duta Nasional KKP 2019.

Diakhir acara penutupan, saat yang sangat dinanti pun tiba, yaitu pengumuman penghargaan KKP 2019. Penghargaan yang diberikan terdiri dari grup dan perorangan meliputi lima kawah, yaitu Kawah Kedisiplinan, Kawah Kebangsaan, Kawah Kepeimpinan, dan Kawah Kreativitas.

Peringkat terbaik

Kawah Kepemimpinan Pelajar SMA Tahun 2019

A. KATEGORI PERORANGAN

1. Terbaik Kawah Kedisiplinan :
 - Terbaik 1: Muhammad Anis Arrafi (SMAN 1 Sekongkang, NTB)
 - Terbaik 2: Bernasib Realino Rey (SMA Seminary St. Yoh, NTT)
 - Terbaik 3: M. Ayyub Abdurrazaq Mansyur (SMAN 1 Kendari, Sulawesi Tenggara)
2. Terbaik Kawah Kebangsaan
 - Terbaik 1: Fika Meyla Amanda (SMAN 1 Kendal, Jawa Tengah)
 - Terbaik 2: Negel Sigit (SMAN 1 Tanjungpandan, Kepulauan Babel)
 - Terbaik 3: Charles Esrom Nupapati (SMAN 1 Serui, Papua)
3. Terbaik Kawah Kepemimpinan :
 - Terbaik 1: Aqil Naufal Rizqullah (SMA Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi, Jambi)
 - Terbaik 2: Rifly Arifansyah (SMAN 5 Payakumbuh, Sumatera Barat)
 - Terbaik 3: Ridho Ansori Romdan (SMAN 3 PPU, Kalimantan Timur)
4. Terbaik KKP SMA Nasional Putera
 - Terbaik 1: Rendi Kurniawan (SMAN 1 Pekanbaru, Riau)
 - Terbaik 2: Freedy Pradana Saputra (SMAN 1 Mataraman, Kalimantan Selatan)
 - Terbaik 3: Muhammad Rafli Bimo Prasetyo (SMA Khadijah, Jawa Timur)
 - Terbaik 4: Abu Ya'qub Yusuf Al Hamdani (SMAN 3 Batam, Kepulauan Riau)
 - Terbaik 5: Ridho Anugrah (SMAN 1 Rejang Lebong, Bengkulu)
5. Terbaik KKP SMA Nasional Puteri
 - Terbaik 1: Sabhina Rigita W (SMAN 4 Pangkalpinang, Kep. Babel)
 - Terbaik 2: Desvita Tria Ningrum (SMAN 1 Depok, Jawa Barat)
 - Terbaik 3: Prisma Firmaya Hakiki (SMAN 1 Pringsewu, Lampung)
 - Terbaik 4: Indah Cahya Mentari (SMAN 1 Balangkejeren, Aceh)
 - Terbaik 5: Faradilah Tais (SMAN 3 Halsel, Maluku Utara)

6. Terbaik KKP SMA Nasional Pendamping Putera
 - Terbaik 1: Rustam Wim (SMAN 1 Sakti, Aceh)
 - Terbaik 2: Muhammad Rusli (SMAN 10 Pekanbaru, Riau)
 - Terbaik 3: Muhammad Natsir (SMAN 3 Medan, Sumatera Utara)
7. Terbaik KKP SMA Nasional Pendamping Puteri
 - Terbaik 1: Dewi Ratna Komala (SMAN 3 Sumedang, Jawa Barat)
 - Terbaik 2: Isoh Sukarsah (SMAN 45 Jakarta, DKI Jakarta)
 - Terbaik 3: Dinda Maryana (SMAN 1 Bukit Kemuning, Lampung)

B. KATEGORI BEREGU/ TIM PROVINSI

1. Terbaik Kawah Kepedulian
 - Terbaik 1: Banten
 - Terbaik 2: Sulawesi Selatan
 - Terbaik 3: Kalimantan Utara
2. Terbaik Penampilan Seni dan Budaya
 - Terbaik 1: Jawa Barat
 - Terbaik 2: Kalimantan Tengah
 - Terbaik 3: Lampung
3. Terbaik Penampilan Gerai Pameran
 - Terbaik 1: DKI Jakarta
 - Terbaik 2: Kalimantan Barat
 - Terbaik 3: Sulawesi Barat
4. Terbaik Kawah Kreativitas
 - Terbaik 1: Sumatera Selatan
 - Terbaik 2: Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Terbaik 3: Maluku
5. Terbaik Debat
 - Terbaik 1: DKI Jakarta
 - Terbaik 2: Sulawesi Tengah
 - Terbaik 3: Sumatera Utara
6. Terbaik Imtaq
 - Terbaik 1: Gorontalo
 - Terbaik 2: Bali
 - Terbaik 3: Sulawesi Utara



AKREDITASI SEKOLAH

Memastikan Layanan Pendidikan Terstandar

Direktorat Pembinaan SMA melalui Badan Standar Nasional Pendidikan terus berupaya meningkatkan dukungan kepada sekolah melalui akreditasi sekolah. Langkah untuk memastikan layanan yang diberikan penyelenggara pendidikan sesuai standar nasional.



Masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan berhak penuh atas pendidikan yang bermutu. Karena itu, seluruh sekolah sebagai penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk memenuhinya dan tentu sesuai dengan standar nasional. Langkah yang diambil pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Ada delapan SNP dan kesemuanya harus dievaluasi, diakreditasi, dan memenuhi kualifikasi untuk mendapat-

kan sertifikat telah memenuhi SNP. Kedelapan standar tersebut adalah Standar Isi; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Proses Pendidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pembinaan Pendidikan; Standar Penilaian Pendidikan; serta Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Implementasi akreditasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar SNP tersebut, menurut Direktur Pembinaan SMA Purwadi Sutanto, bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. "Akreditasi merupakan pertanggungjawaban atas pelayanan pend-

dikan dan lembaga penyelenggara pendidikan. Mereka harus diakreditasi karena itu menjadi syarat sebagaimana tersurat dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Purwadi saat memberikan pengarahan kepada peserta Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi Tahun 2019.

Direktorat Pembinaan SMA, lanjut Direktur, dari tahun ke tahun terus melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah di seluruh Tanah Air. Dalam konteks pembinaan akreditasi, Direktorat Pembinaan SMA memberikan asistensi bagaimana menyiapkan dan menghadapi akreditasi. “Harapannya bukan semata agar sekolah mendapatkan peringkat yang baik atau sudah terakreditasi, tapi menjadikan sekolah yang selalu menjaga dan meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan,” jelasnya.

Memastikan adanya pemerataan kualitas dan mutu layanan pendidikan menjadi sangat penting karena saat ini masih ada variasi yang lebar antarsekolah terkait mutu sekolah, dan utamanya mutu proses pembelajaran di kelas. “Akreditasi itu untuk memastikan bahwa sekolah berusaha memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan,” katanya seraya menambahkan, dalam standar proses, guru di kelas seharusnya kini berperan sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan evaluator proses pembelajaran peserta didik. Agar dapat memerankan keempat fungsi

tersebut dengan baik, guru sepatutnya selalu meningkatkan kemampuan dirinya. Peningkatan kemampuan guru yang bisa dilakukan para guru secara bersama-sama, melalui forum MGMP atau yang sejenis.

Target 85% Akreditasi B

Pada tahun 2019, menurut Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Hastuti Mustikaningsih, Direktorat Pembinaan SMA melakukan pembinaan pada sekolah yang memiliki peringkat akreditasi C, tidak terakreditasi, dan bagi sekolah yang belum pernah diakreditasi.

“Pembinaan dan asistensi ini untuk membantu sekolah agar mampu mempersiapkan diri untuk akreditasi atau reakreditasi,” kata Hastuti. Ia menambahkan, lebih jauh lagi pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perangkat akreditasi, meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena), dan meningkatkan kompetensi sekolah dalam menyusun rencana tindak lanjut persiapan akreditasi.

Dalam konteks target akreditasi, lanjut Hastuti, untuk jenjang SMA diharapkan pada tahun ini 85 persen dari seluruh SMA di Indonesia terakreditasi B. Angka 85 persen tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mencapai Rencana Strategis Kemendikbud 2015-2019 di bidang akreditasi.

Namun di luar konteks itu, Hastuti menegaskan, bagi sekolah, akreditasi sejatinya bisa menjadi bahan refleksi untuk melihat sudah seberapa baik mereka dalam bekerja memenuhi SNP sekaligus menjadi bahan evaluasi pada bagian mana dari standar nasional tersebut yang belum dipenuhi sekolah dan upaya apa yang harus dilakukan.

Budaya Meningkatkan Mutu

Akreditasi merupakan upaya peningkatan dan penjaminan mutu sekolah. Karena itu, sebagaimana ditegaskan Dhani Hamiddan Khoir, Kepala Seksi Kelembagaan pada Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMA, upaya peningkatan mutu sekolah seharusnya menjadi sebuah budaya di sekolah yang terwujud di dalam sikap dan perilaku warga sekolah.

“Contoh nyatanya adalah guru di sekolah terus belajar meningkatkan kemampuan pedagogis dan didaktis, selain meningkatkan pengetahuan mata pelajaran yang diampunya, agar proses belajar di kelas menjadi terus lebih baik,” kata Dhani.

Karena itu, lanjut Dhani, akreditasi seharusnya tidak menjadi ritual tanpa makna atau pencarian status. “Bila sekolah yang mengikuti akreditasi hanya menjadikan prosesnya sebagai ritual, lalu hasilnya menjadi penegasan status, setelah itu apa?” ujarnya.

1 & 2. Kegiatan belajar mengajar yang melibatkan peserta didik secara aktif





1



2



3

1. Kegiatan membuatik yang dilakukan siswa
2. Peserta didik menggunakan fasilitas sekolah untuk belajar dan memperkaya materi yang telah didapat di kelas.
3. Hastuti Mustikaningsih (Kasubdit Kembangan dan Sarana Prasarana Direktorat PSMA)

Klasifikasi Akreditasi

Secara definisi, akreditasi memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu (KBBI). Definisi lain menyatakan, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002.

Dari kedua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)/Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi ini dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan kriteria standar yang telah ditetapkan.

Sekolah akan mendapatkan status "terakreditasi" jika keadaan sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sekolah tidak dapat "terakreditasi" jika keadaan sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Bagi sekolah yang terakreditasi diklasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu Akreditasi A (Amat Baik) dengan nilai antara 86-100; Akreditasi B (Baik) dengan nilai antara 71-85; dan Akreditasi C (Cukup) dengan nilai antara 56-70. Jika nilai tersebut kurang dari 56 maka sekolah tersebut tidak layak untuk mendapatkan pengakuan "terakreditasi".

Mekanisme Akreditasi Sekolah

1. Penetapan Sasaran Sekolah

BAN-S/M menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan pangkalan data BAN-S/M. BAP-S/M melakukan validasi terhadap data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi.

2. Sosialisasi dan Penyampaian Perangkat Akreditasi

Keputusan BAN-S/M tentang kuota dan sasaran akreditasi disampaikan kepada sekolah melalui BAP-S/M, Disdik Provinsi. Tujuan kegiatan ini adalah agar sekolah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi, dengan:

- mempelajari perangkat akreditasi,
- tahapan dan jadwal pelaksanaan,
- tugas dan tanggung jawab sekolah, serta
- mengisi instrumen dan melengkapi data pendukung.

3. Pengisian dan Pengiriman Instrumen Akreditasi

Sekolah mengunduh dan mempelajari dokumen Perangkat akreditasi yang terdiri atas: (a) Instrumen Akreditasi, (b) Petunjuk Teknis; (c) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung, (d) Teknik Penskoran dan Pemingkatan Hasil Akreditasi.

Sekolah juga mengisi secara online melalui aplikasi Sispena: (a) instrumen akreditasi dan (b) instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, sesuai kondisi riil sekolah.

4. Penetapan Kelayakan Sekolah/Madrasah dan Penugasan Asesor

BAP-S/M mengunduh dan mengevaluasi hasil isian akreditasi sekolah dari Sispena S/M untuk menentukan kela-



yakan sekolah yang akan diakreditasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah yang akan divisitasi telah memenuhi persyaratan kelayakan. Selanjutnya BAP-S/M mengirimkan hasil penetapan kelayakan untuk divisitasi kepada sekolah dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke sekolah yang memenuhi persyaratan.

5. Visitasi ke Sekolah

Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung (IPDIP), mengacu pada petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi serta observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan kondisi lingkungan sekolah.

6. Validasi Proses dan Hasil Visitasi

Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAP-S/M. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi

Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAP-S/M melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah.

8. Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi

Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri oleh anggota BAN-S/M dituangkan dalam surat keputusan. BAP-S/M membuat rekomendasi untuk pihak terkait guna ditindaklanjuti dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

9. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi

Hasil pleno BAP-S/M dan BAN-S/M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan dengan dilengkapi rekomendasi akreditasi. Isi surat keputusan tersebut memuat data seluruh sekolah yang telah diakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Sebagai bukti status dan peringkat akreditasi yang telah dicapai oleh sekolah, BAP-S/M menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada setiap sekolah yang terakreditasi.

10. Sosialisasi Hasil Akreditasi

Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar, media massa, website, dan media lainnya.

REFORMASI BIROKRASI

Meningkatkan Layanan Bagi Semua

Reformasi birokrasi di instansi pemerintah membawa dampak positif bagi jajaran internal maupun masyarakat. Khusus di Kemendikbud, reformasi birokrasi diarahkan bagi terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan satu dari 12 instansi pemerintah yang diprogramkan untuk merintis dan melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi di Kemendikbud diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”.

Terkait dengan konteks reformasi birokrasi Kemendikbud, pengembangan nilai-nilai budaya kerja perlu dilakukan melalui proses perumusan dan kesepakatan nilai dasar, tata nilai, norma, sikap dan perilaku kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan karakter organisasi sebagai pelayan masyarakat, perbaikan kebijakan, penerapan manajemen modern, peningkatan pengawasan, evaluasi kinerja dan penegakan disiplin bagi aparatur Kemendikbud. Sasaran akhir dari pengembangan budaya baru Kemendikbud yang dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh adalah terwujudnya integritas dan produktivitas kerja seluruh unit utama di lingkungan Kemendikbud. Oleh karena itu, Kemendikbud bertekad memanfaatkan pengembangan budaya baru ini sebagai sarana penunjang Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional secara komprehensif.

Istilah reformasi birokrasi memang baru beberapa tahun belakangan ini digaungkan, karena desakan dan adanya kewajiban untuk melaksanakannya. Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya kita semua (khususnya badan publik) untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya untuk

memberikan pelayanan yang terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*)

Mengapa reformasi birokrasi ini menjadi penting? Beberapa permasalahan masih ditemukan dan dirasakan oleh masyarakat ketika berurusan dengan aparat. Mungkin orang sering mengalami bagaimana kecewanya ketika tidak dilayani dengan baik, lambat. Atau dilayani dengan wajah cemberut, di ping pong dari satu meja ke meja yang lain. Ini hanya salah satu contoh dari pola pikir dan budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional.

“Agen perubahan ini diharapkan dapat memberikan contoh pertama dalam perilaku, kedisiplinan dan integritasnya.”

Beberapa permasalahan lain yang juga sering ditemui seperti pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat. Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai *quality assurance*. Sistem monitoring, evaluasi dan penilaian belum dibangun dengan baik. Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme. Untuk itu dalam rangka mendorong terlaksananya reformasi birokrasi diperlukan pembentukan Zona Integritas (ZI) serta akuntabilitas



1. Direktur dan Kasubdit Direktorat PSMA dalam peuncuran Buku Budaya Kerja Direktorat PSMA
2. Salah satu kegiatan di Direktorat PSMA



Hasil Survey Praktik Reformasi Birokrasi

Usaha yang terus menerus dilakukan, tentunya dengan dukungan penuh

para pimpinan, nyatanya telah membuah hasil. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Direktorat PSMA telah melakukan survey internal dan eksternal pada Januari 2019. Survey internal terkait dengan Praktek RBI, Persepsi Korupsi, Integritas Organisasi serta Integritas Jabatan. Sementara survey eksternal terkait dengan Kepuasan Pelayanan Masyarakat dengan tujuan mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dit. PSMA dengan target sasaran peserta kegiatan dan tamu instansi, kepala sekolah/guru, dinas pendidikan/LPMP dan peserta didik.

Hasil survey tersebut menggambarkan sebagian besar menunjukkan adanya perubahan ke arah positif dari semua bidang yang ditanyakan. Dalam konteks hasil survey di internal Direktorat PSMA, Direktur Pembinaan SMA Purwadi Sutanto yang menjadi motor penggerak agen perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi, mengungkapkan bahwa meskipun hasil survey menunjukkan respon yang positif, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan. "Caranya, kami akan terus dorong pengembangan integritas organisasi melalui para agen perubahan di unit kerja masing-masing. Sehingga ke depan semua pihak merasa senang dan puas berhubungan dengan kami," ungkap Purwadi Sutanto.

kinerja agar tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien serta yang paling penting adalah pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Tujuan reformasi birokrasi sebenarnya sangat ideal, yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja. Birokrasi yang baik harus didukung oleh profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima. Untuk mewujudkan berhasilnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah, setidaknya terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi di lingkup Dit PSMA

Implementasi reformasi birokrasi memang tergantung kepada instansi masing-masing namun memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan yang terbaik. Lantas bagaimana dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Pembinaan SMA? Reformasi birokrasi di instansi ini langsung direspon dengan menginisiasi terbentuknya budaya kerja baru sesuai tuntutan zaman. Ada tiga target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan

pelayanan publik. Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas melalui dua tahap, yaitu penancangan Pembangunan Zona Integritas dan proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pada tahap penancangan, deklarasi/ Pernyataan dilaksanakan melalui Penandatanganan Piagam Penancangan Pembangunan ZI oleh Pimpinan unit kerja (minimal unit Eselon III). Penancangan ini dilakukan oleh Unit yang seluruh pegawai telah menandatangani dokumen pakta integritas. Tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang merupakan tindak lanjut dari penancangan pembangunan ZI. Penerapan komponen pembangunan ZI sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK

Untuk memperlancar proses kerja, kemudian disepakati bersama pembentukan agen perubahan. Kenapa perlu ada agen perubahan? Karena para agen perubahan ini diharapkan dapat memberikan contoh pertama dalam perilaku, kedisiplinan dan integritasnya. Setelah dimulai dari diri sendiri, baru mereka mensosialisasikan atau memastikan terlaksananya reformasi birokrasi, zona integritas serta akuntabilitas kinerja.

SMAN 3 PADANG

Riset, Kompetensi Sosial dan Spiritual

Melakukan riset adalah salah satu cara siswa SMA Negeri 3 Padang memaknai literasi. Mereka dituntut mencari tahu sumber, bagaimana mencari, memilah dan memilih setiap informasi yang mereka peroleh lalu kemudian mengolahnya sehingga bermanfaat.



Selepas pukul dua belas siang, suara azan zuhur menyelinap ke se-antero kompleks sekolah. Bak semut yang keluar dari sarang, ratusan siswa berduyun-duyun keluar dari kelas. Siswa perempuan berjalan ke arah masjid depan. Siswa laki-laki sebaliknya, menuju masjid yang di bagian belakang sekolah.

Di masjid depan, seorang siswa baru selesai mengumandangkan azan. Alat pengeras suara baru saja ia kembalikan ke tempat semula. Sambil menunggu ruangan benar-benar terisi, ia memilih shalat dua

rakaat. Setelah masjid betul-betul terisi, seorang siswa maju menjadi imam salat. Hanya ada dua shaf laki-laki di masjid itu, selebihnya adalah perempuan. Laki-laki yang salat di masjid ini memang sengaja dibatasi jumlahnya. Untuk laki-laki salat di masjid belakang.

Usai salat berjamaah. Kegiatan berlanjut. Seorang siswa perempuan naik ke mimbar. Tanpa sedikitpun terlihat kikuk, ia berceramah menjelaskan kerugian yang akan menimpa orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Selama hampir lima belas menit sehabis salat, masjid masih terisi penuh.

Bagi warga SMA Negeri 3 Padang, salat berjamaah, memimpin doa, dan ceramah agama, merupakan bagian keseharian. Khususnya bagi yang muslim, kegiatan tersebut menjadi keharusan. Selain itu, masih ada 'kewajiban' lain yang disepakati oleh seluruh siswa di SMA tersebut. Di antaranya, seluruh siswa muslim dituntut tahfidz Alquran, khusus bagi laki-laki wajib bisa azan. Ia juga wajib mampu menjadi imam salat, memulasara jenazah, ceramah atau khutbah, memimpin doa, hingga debat ilmiah ala surau.

Untuk mewadahi seluruh kegiatan tersebut, siswa membentuk ekstrakurikuler "Surau". Kegiatan ekstrakurikuler ini lahir karena keinsyafan warga sekolah untuk menjaga kearifan budaya Minang. Bagi masyarakat Minang, surau adalah lembaga pendidikan hidup atau kecakapan hidup. Di surau anak-anak belajar mengaji dan mengkaji. Di tempat inilah, anak-anak ditempa sehingga menguasai keterampilan manggaleh dan basilek. Mereka juga diajari bagaimana bersosialisasi.

Semua kegiatan tersebut sesungguhnya merupakan upaya sekolah mempersiapkan siswanya agar mampu bermasyarakat. “Orang yang cerdas itu merancang masa depan” demikian salah satu motto yang dipegang para siswa di SMA Negeri 3 Padang.

Untuk menunjang program ekstrakurikuler Surau, SMA Negeri 3 Padang membangun gedung “Pusat Kajian Islam” Surau Nurul Ilmi. Anggaran pembangunannya sepenuhnya bersumber dari dana alumni SMAN 3 dari berbagai angkatan.

Penerapan pendidikan berbasis surau sesungguhnya bukan hal baru bagi masyarakat Padang. Pendidikan berbasis surau merupakan hasil adopsi pola pendidikan yang diterapkan di surau-surau tempo dulu. Pada praktiknya, siswa ditempa dengan materi agama, misalnya tahfiz alquran, azan, mampu menjadi imam, menyelenggarakan jenazah, memberi khutbah, ceramah, memimpin doa, debat ilmiah ala surau, kepandaian dasar padusi minang, randai atau silek serta berbagai kewirausahaan.

Satu Siswa Satu Riset

SMA Negeri 3 Padang berdiri 1 April 1977. SMA Negeri 3 Padang terus berupaya mempersiapkan peserta didik mereka agar mengenal, memahami, menghayati dan mengimani ajaran agama islam. Kecerdasan sosial dan spiritual, diyakini menjadi sangat penting dan harus bisa diaplikasikan. Melalui pendidikan berbasis surau, sekolah berupaya menyediakan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa memiliki kecerdasan, sikap yang baik, serta keterampilan. Sehingga, setelah tamat, siswa dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Selain membekali siswanya dengan keterampilan sosial dan spritual, SMA Negeri 3 Padang juga membekali siswanya dengan keterampilan pendukung akademik. Salah satunya keterampilan melakukan riset.



1. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler Surau di SMAN 3 Padang
2. Tampak depan gedung SMAN 3 Padang

Keterampilan ini diajarkan kepada setiap siswanya bukan tanpa alasan. Lulusan SMA sedianya memang diarahkan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang perguruan tinggi. Namun, faktanya, lulusan SMA justru belum siap untuk memasuki perguruan tinggi. Salah satu keterampilan yang belum banyak dikuasai lulusan SMA adalah keterampilan untuk melakukan riset.

Berangkat dari fakta inilah, sejak 2016, SMA Negeri 3 Padang mewajibkan seluruh siswa dan guru melakukan riset dasar. Meskipun dasar, mereka benar-benar dipersiapkan secara serius. Sebelum melakukan riset mereka diberikan bekal keterampilan dasar melalui pelatihan riset dasar.

Tak cukup hanya itu, siswa juga mendapatkan bimbingan untuk menemukan objek yang akan mereka riset. Berkat tradisi ini, setiap siswa di sekolah ini dapat berbangga karena setidaknya mereka memiliki satu produk yang mereka hasilkan dari riset. Biasanya objek yang mereka pilih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Hasil riset tentang pemanfaatan ampas tebu untuk menjernihkan air, misalnya, didasari oleh pengamatan siswa terhadap ampas tebu yang banyak dibuang oleh penjual air perasan tebu di pinggir jalan. Tidak hanya itu, siswa lainnya juga melakukan riset peman-

“Riset adalah upaya anak untuk membuktikan bahwa literasi itu bukan sekadar teori, melainkan bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata.”

faatan ampas tebu untuk membuat plafond rumah. Hasil riset lainnya misalnya tentang jenis dan pengolahan tanaman obat.

Tradisi melakukan riset merupakan puncak dari pelaksanaan literasi sekolah. Riset adalah upaya anak untuk membuktikan bahwa literasi itu bukan sekadar teori, melainkan bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

Literasi menjadi hal penting. Literasi yang kuat membuat seseorang menjadi bijak dalam menerima suatu informasi. Ciri literasi yang kuat itu salah satunya adalah menjadi pembaca yang kritis. Ia akan memilah dan memilih informasi. Saat menerima informasi, ia akan mencari sumber informasi, kemudian membuktikan dan bagaimana prosedur mendapatkan informasi tersebut.

**SNMPTN:**

Jalur Kuliah Peserta didik Berprestasi

Peserta didik berprestasi tinggi dan konsisten menunjukkan prestasinya di jenjang SMA sederajat, layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sebanyak 92.331 peserta didik lolos pada SNMPTN 2019.



Hari-hari menjelang tanggal 22 Maret 2019 menjadi saat-saat menegangkan bagi peserta SNMPTN 2019. Maklum saja, tanggal tersebut merupakan hari pengumuman peserta yang lolos SNMPTN. Jika lolos, maka itu menjadi momentum penting bagi mereka dalam meniti langkah di bangku kuliah. Tentu di perguruan tinggi yang diharapkan. Jika gagal, belum pupus harapan memang, namun mereka harus bekerja keras dalam mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang lain.

Tak dimungkiri, skema SNMPTN menjadi favorit bagi peserta didik berprestasi untuk melanjutkan angan-angan mereka melanjutkan studi ke bangku kuliah. Baru kemudian pilihan lain dicoba setelah SNMPTN. Yakni sebagaimana pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang disiapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yakni Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan ujian mandiri (UM).

Menurut Menristekdikti Mohamad Nasir, adanya pembagian pada tiga skema dalam penerimaan mahasiswa baru dimaksudkan untuk mendukung perguruan tinggi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tinggi Indonesia agar dapat bersaing di tingkat dunia.

Skema penerimaan mahasiswa baru PTN melalui SNMPTN dilakukan melalui mekanisme perguruan tinggi negeri mengundang siswa-siswa berprestasi dari sekolah tertentu untuk mengikuti seleksi masuk tanpa tes. Penerimaan didasarkan pada grafik nilai rapor dan prestasi lainnya selama di jenjang SMA. Maka tak heran jika jalur SNMPTN ini kerap juga disebut sebagai jalur “undangan”.

Menurut Nasir, Kemristekdikti setiap tahun melakukan evaluasi terhadap capaian mahasiswa tahun pertama. Apabila mahasiswa nilainya menurun dan tidak sesuai dengan portofolio untuk jalur SNMPTN akan dikaji kuotanya. Atau sebaliknya, apabila mahasiswa jalur SNMPTN lebih baik dari SBMPTN akan menjadi pertimbangan untuk kuota tahun berikutnya.

Sebanyak 92.331 Peserta Lolos

Untuk penyelenggaraan tahun ini, sebagaimana pengumuman SNMPTN 2019 pada 22 Maret siang, ada 92.331 peserta yang dinyatakan lolos dan diterima di universitas dan jurusan kuliah pilihannya. Menurut data Kemristekdikti, persentase peserta yang berhasil tahun ini adalah 19,29 persen.

Mayoritas PTN yang menjadi favorit bagi para peserta di SNMPTN 2019 berada di Pulau Jawa. Selain itu, Kemristekdikti juga mengungkapkan, pada tahun ini Universitas Padjadjaran bergeser ke posisi kedua sebagai PTN terfavorit, setelah tujuh kali berturut-turut selalu menduduki peringkat pertama. Universitas Brawijaya tahun ini menjadi PTN terfavorit di SNMPTN 2019 dengan jumlah pendaftar mencapai 32.495 pesert (lihat tabel 10 Besar PTN Favorit).

Pengelolaan dan pengolahan data untuk kepentingan seleksi jalur SNMPTN dilakukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang merupakan satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Meski demikian, dalam kerangka integrasi pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, sekolah diberi peran dalam proses seleksi SNMPTN. Sekolah sebagai satuan pendidikan dan guru sebagai pendidik diasumsikan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran yang merupakan prinsip pendidikan karakter. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa dengan lengkap dan benar. PDSS yang merupakan basis data inilah yang menjadi sumber utama data SNMPTN. (dbs)

10 Besar PTN Favorit SNMPTN 2019

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	PENDAFTAR
1.	Universitas Brawijaya	32.495
2.	Universitas Padjadjaran	29.531
3.	Universitas Diponegoro	27.633
4.	Universitas Sebelas Maret	24.976
5.	Universitas Gadjah Mada	24.877
6.	Universitas Negeri Semarang	23.886
7.	Universitas Sumatera Utara	22.496
8.	Universitas Pendidikan Indonesia	21.704
9.	Universitas Negeri Yogyakarta	20.888
10.	Universitas Hasanuddin	18.977

Lebih Dekat tentang SNMPTN

KETENTUAN UMUM

- SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor dan portofolio akademik. Rapor yang digunakan adalah semester satu sampai dengan semester lima bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga tahun atau semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat tahun.
- Sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisi data prestasi siswa di PDSS dengan lengkap dan benar.
- Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
- Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca informasi pada laman PTN pilihan tentang ketentuan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut.

KETENTUAN KHUSUS

Persyaratan Sekolah:

Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah:

- SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
- Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Persyaratan Siswa Pendaftar:

Siswa pendaftar yang berhak mengikuti SNMPTN adalah:

- Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) pada tahun 2019 yang memiliki prestasi unggul.
- Memiliki NISN yang terdaftar di PDSS
- Memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan oleh sekolah di PDSS atau memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 7 bagi SMK dengan masa belajar empat tahun.
- Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN.

(Sumber: <http://web.snmptn.ac.id>)

WAJAR 12 TAHUN

Memperluas Akses Pendidikan Menengah

Program wajib belajar 12 tahun sejatinya bukan sekadar memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi generasi muda usia sampai 21 tahun, tetapi juga menyiapkan generasi dengan kompetensi intelektual, keterampilan dan kepribadian yang andal.



Foto: Istimewa

Perkembangan dunia mutakhir menuntut kompetensi yang tak hanya mampu beradaptasi tetapi juga mampu bersaing di era industri 4.0 yang makin ketat. Karena itu, bukan saja sudah waktunya mengubah penerapan Wajib Belajar 9 tahun menjadi 12 tahun, melainkan menjadi tuntutan zaman yang bersifat segera untuk diwujudkan.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan empat tahun silam telah “menabuh gendang”,

memastikan penerapan Wajib Belajar 12 tahun menjadi agenda penting dalam peta peningkatan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Apalagi amanah Wajib Belajar 12 tahun, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Tujuannya, dalam rangka memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia usia sampai dengan 21 tahun sampai dengan jen-

jang pendidikan menengah.

Untuk mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun tersebut, Kemendikbud melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya intervensi dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2020 sebesar 93,6 persen. Untuk mendukung intervensi terhadap wajib belajar tersebut perlu adanya peningkatan mutu pendidikan, sebagai upaya mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun yang berkualitas. Menjaga mutu wajib belajar inilah

yang pada tahap awal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Langkah strategis lainnya, untuk mewujudkan Wajib Belajar 12, Kemendikbud telah melakukan pembangunan gedung sekolah menengah, sekitar 900 unit sekolah baru. Unit sekolah baru tersebut terdiri dari 450 untuk pendirian SMA, dan 450 SMK. Langkah ini diimplementasikan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, terhadap kebutuhan daerah terhadap sekolah menengah di setiap kabupaten/kota sebagai upaya menjangkau anak usia sekolah yang belum terlayani.

Ragam Upaya Kemendikbud

Tak hanya pembangunan unit sekolah baru, perluasan akses di jenjang sekolah menengah juga ditempuh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui DAK, sejauh ini Kemendikbud berhasil membangun ruang kelas hingga 50-an ribu. Belum lagi jika ditambahkan dengan alokasi APBD, ruang kelas yang telah dibangun bisa sekitar 70-an ribu kelas. Dengan kata lain, selama beberapa tahun terakhir, apa yang sudah dilakukan Kemendikbud sudah sangat optimal, meski menyisakan kira-kira sekitar 10 persen dari jumlah sekolah-sekolah yang rusak yang secara simultan dilakukan rehabilitasi.

Terlebih secara bersamaan, perbaikan sarana prasarana untuk jenjang sekolah menengah tersebut juga dibarengi dengan upaya nyata Kemdikbud lainnya dalam mendukung suksesnya gerakan Wajib Belajar 12 tahun. Sebut saja sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan secara bertahap. Dengan demikian, program Wajib Belajar 12 tahun bisa terwujud dan bisa segera mencapai titik optimum wajib belajar.

Sistem zonasi yang telah dua tahun terakhir diimplementasikan, sebagaimana dikemukakan Mendikbud Muhadjir Effendy, menjadi salah satu pendekatan dalam mensukseskan

Wajib Belajar 12 tahun. Jika sebelumnya sekolah menunggu siswa datang mendaftarkan diri, mulai tahun 2018 lalu sekolah diminta aktif mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki anak usia sekolah untuk masuk sekolah, bersama aparat daerah.

Menurut Mendikbud, jikapun ada warga usia sekolah tak mampu mengakses pendidikan formal, alternatifnya adalah pendidikan kesetaraan. Walhasil, tidak boleh lagi anak usia wajib belajar 12 tahun yang tidak belajar.

Dukungan Regulasi

Implementasi Wajib Belajar 12 tahun sebagai upaya mempersiapkan generasi dengan kompetensi yang mampu diandalkan, memiliki landasan hukum yang sangat kuat, tak hanya amanah RPJMN tahun 2015-2019. Dukungan regulasi lainnya antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 UU Sisdiknas menyatakan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Kemudian pada Pasal 7 ayat 4, Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang

pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah; ayat 5: Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah; ayat 6: Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.

Ada pula Permendikbud No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa PIP bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan nasional.

Semoga upaya pengentasan warga usia sekolah hingga 21 tahun melalui program Wajib Belajar 12 tahun segera terwujud untuk generasi ideal, generasi emas Indonesia. ●



2

1. Ilustrasi siswa berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah
2. Kegiatan belajar mengajar di kelas



ANANDA HAFIDH RIFAI

Peraih Nilai Sempurna

× UNBK

Meraih nilai sempurna di sekolah tentu keinginan sebagian besar bahkan semua siswa di Indonesia, mungkin bisa jadi di dunia. Namun, semua pun sadar, bahwa nilai sempurna tidak dapat diraih semudah membalikan telapak tangan.



Nama : Ananda Hafidh Rifai Kusnanto
Lahir : Sukoharjo, 11 Oktober 2001
Asal Sekolah : SMAN 4 Surakarta
Prestasi : Medali Perak OSN 2017 Bidang Astronomi

Begitupun dengan Ananda Hafidh Rifai, siswa SMAN 4 Surakarta. Ia tidak pernah menyangka bahkan tidak pernah menaruh target mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran yang di Ujian Nasional kan. Ia masih tidak percaya kalau ia berhasil mendapatkan nilai sempurna di Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) lalu. Seperti diketahui, UNBK adalah ujian akhir masa sekolah yang harus ditempuh semua siswa kelas XII, mendapat nilai sempurna atasnya tentu sebuah kebanggaan dan prestasi yang tidak main-main. Mungkin jika mendapatkan satu saja nilai 100, bisa jadi adalah hal biasa. Tapi jika berhasil meraih nilai 100 di semua pelajaran di UN kan, tentu hal yang luar biasa.

Anak pertama dari pasangan Amat Kusnanto (alm) dan Supadmi itu memang pintar, pada tahun 2017 ia berhasil meraih medali perak OSN untuk Lomba Astronomi. Hafidh memang menyukai dunia fisika yang begitu banyak hitungan matematis didalamnya.

Ternyata, pengalamannya meraih me-



Hafidh (tengah, berjaket abu) bersama teman-temannya saat study tour

dali perak OSN menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan dalam hidupnya, ia merasa sangat bahagia ketika lolos dan mewakili Provinsi Jawa Tengah melaju ke tingkah Nasional. "Pengalaman yang paling berkesan ya waktu ikut OSN 2017, karena bisa mencetak rekor buat sekolah, akhirnya bisa tembus ke tingkat nasional. Selain itu pertama kali juga menginjakkan kaki di Pulau Sumatera, ketemu banyak teman dari seluruh Indonesia, dan Alhamdulillah bisa bawa pulang medali" ujarnya penuh senyum.

Pertama yang terbersit ketika mendengar peraih nilai UNBK tertinggi dengan nilai yang sangat sempurna, mungkin orang akan tanya, bimbil dimana? Dan Hafidh tidak melakukan itu. "Sebenarnya Cuma ngikutin yang diberikan sekolah aja, setelah itu di review di sekolah bareng teman-teman, kalau masih sempat di review lagi di rumah" jelasnya ketika ditanya bagaimana pola belajar yang dilakukan sehari-hari. Berkat ketekunan dan kerajinannya itu, akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan.

"Gak pernah terbayang sih dapat nilai UNBK tinggi banget, karena nilainya gak bisa dipakai untuk daftar PTN dan juga sudah diterima SNMPTN" ujarnya

seraya tersenyum ketika disinggung apakah pernah terbayang sebelumnya dapat nilai sempurna ini. Buah dari ketekunan itu juga lah yang membawanya lolos seleksi SNMPTN di Universitas Gadjah Mada. Hafidh, dibalik kecerdasannya ia tetaplah remaja pada umumnya yang mengisi waktu senggang dengan *googling* dan main *game*.

Penerima PIP

Hafidh bukanlah berasal dari keluarga yang mampu secara finansial. Supadmi, Ibu Hafidh, merupakan tulang punggung keluarga sejak ayah Hafidh berpulang. Ibu Hafidh mencari nafkah dengan berjualan mainan anak-anak di lingkungan SD. Hafidh pun sudah terbiasa hidup dalam penuh keterbatasan ekonomi. Ibunya yang hanya berpenghasilan kotor 50.000/hari terpaksa harus gali lubang tutup lubang untuk menghidupi Hafidh dan ketiga adiknya. Maka dengan kondisi ekonomi keluarga yang seperti itu, tidak heran, sebagai anak pertama, Hafidh memiliki keinginan kuat untuk dapat membuat keluarganya keluar dari masalah ekonomi. "Hanya ingin keluarga mapan secara ekonomi" ujarnya.

Beruntungnya Hafidh juga merupakan

"Sebenarnya Cuma ngikutin yang diberikan sekolah aja, setelah itu direview di sekolah bareng teman-teman, kalau masih sempat direview lagi di rumah"

salah satu siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Tentu program ini juga memberikan banyak manfaat dan membantu kelangsungan sekolah Hafidh dengan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Melalui Program Indonesia Pintar jugam Hafidh dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya.

Hafidh merupakan salah satu anak muda Indonesia yang patut menjadi contoh dan panutan bagi anak muda lainnya, bahwa dengan ketekunan dan keinginan yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Faktor ekonomi bukanlah penghalang untuk maju dan berprestasi, karena sesungguhnya ketekunan adalah kunci.



Menghadirkan Layanan Pendidikan Bermutu

SUHADI

Kasubdit Program dan Evaluasi,
Direktorat Pembinaan SMA

Kepemimpinan kepala sekolah, pengembangan proses pembelajaran, dan pelibatan ekosistem pendidikan menjadi substansi penting untuk mewujudkan sekolah dengan layanan pendidikan bermutu.

Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat hadirnya pendidikan berkualitas menjadi tantangan yang tak mudah. Apalagi bangsa Indonesia “digadang-gadang” menjadi negara besar karena bakal menjadi negara dengan bonus demografi ketika usia produktif menjadi paling banyak.

Memiliki warga negara dengan usia muda terbanyak, satu sisi memang akan menjadi keuntungan bagi negara kita. Namun itu semua bergantung pada sejauh mana kita membenahi SDM kita melalui pendidikan bermutu untuk generasi muda yang mandiri dan berkualitas. Pendidikan bermutu menjadi kunci agar prediksi dengan bonus demografi Indonesia menjadi negara kuat pada 2045 bukan hanya mimpi.

Dalam konteks mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, setidaknya ada tiga poin penting yang harus menjadi perhatian, yakni kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*), pengembangan pembelajaran (*learning improvement*), dan pelibatan partisipasi orangtua (*parent participation*). Ketiganya saling berkelindan untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga yang mampu menghadirkan pendidikan dengan mutu layanan yang baik. Kepemimpinan, proses pembelajaran, dan peran orangtua (juga masyarakat) memiliki fungsi masing-masing dan dalam memiliki relasi saling mengisi.

Selain itu harus pula hadir akuntabilitas, keputusan bersama dan menjadi *team work* yang saling melengkapi, memperbaiki dengan tujuan peserta didik diberikan 4C dan kemampuan HOTS. Karena mereka pada akhirnya harus memiliki karakter yang kuat, kemampuan literasi dan kompetensi.

Pada lingkungan sekolah, tak bisa dinafikan kepemimpinan seorang kepala sekolah menjadi kunci untuk menjadikan

sekolah memiliki layanan pendidikan bermutu. Seorang kepala sekolah harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat (*strong leader*) yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan terkait keseluruhan proses layanan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang menjadi anutan, inisiator, motivator, inspirator, sekaligus melakukan evaluator dari keseluruhan proses yang dilakukan. Sebagai pemimpin, kepala sekolah juga harus menerapkan manajemen yang transparan sekaligus akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

“Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang menjadi anutan, inisiator, motivator, inspirator, sekaligus sebagai evaluator.”

Pengembangan pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan para guru harus mampu berinovasi dan berkreasi menawarkan pembelajaran yang bukan saja memenuhi kebutuhan akademis tetapi juga mendukung penguatan kompetensi peserta didik. Misalnya mengembangkan disiplin ilmu komputasional sebagai upaya membekali peserta didik agar mampu beradaptasi di era disrupsi dan industri 4.0.

Satu hal lain yang tak bisa dipisahkan dalam mengembangkan layanan pendidikan bermutu adalah pelibatan partisipasi orangtua. Para orangtua harus terlibat secara aktif karena mencetak peserta didik harus memiliki kesamaan paham sekaligus persepsi dengan sekolah. Mendidik anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah tetapi juga para orangtua dan *stakeholders* lainnya. ●

Beasiswa Pondok pesantren UII Yogyakarta untuk Kuliah S1

(Deadline Maret s/d Agustus 2019)

Beasiswa ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII), merupakan upaya implementasi dari misi dan tujuan UII untuk memberikan bekal kepada para kader pemimpin umat di masa yang akan datang, yang siap secara konsep dan praktek, disertai keilmuan yang merupakan perpaduan antara sains, agama, dan teknologi. Beasiswa ini diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/Sederajat serta Mahasiswa UII.

Benefit yang didapat dari beasiswa ini adalah:

- A. Bebas biaya kuliah, dana Catur Darma Perguruan Tinggi dan biaya lain di universitas.
- B. Bebas biaya pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren
- C. Menempati pondok pesantren dan menggunakan fasilitas yang ditujukan bagi santri sesuai ketentuan.

Info selengkapnya:



Beasiswa Unggulan UII

(Deadline: Mengikuti jadwal akademik)

Salah satu beasiswa yang dapat dicoba adalah beasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) ini, sasaran program ini merupakan mahasiswa baru UII tahun akademik 2019/2020 yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik.

Bentuk beasiswa yang diberikan:

- A. Bebas biaya pendidikan (biaya SPP tetap, bebas biaya SPP variable, bebas biaya KKN)
- B. Bantuan Dana Catur Dharma maksimal 5 juta.

Info selengkapnya:



Beasiswa Kuliah S1 di Universitas Esa Unggul Jakarta

(Deadline Gelombang 3: Agustus 2019)

Universitas Esa Unggul merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia, saat ini menawarkan empat skema beasiswa bagi calon mahasiswa baru yaitu Beasiswa Unggulan 100%, Beasiswa Prestasi, Beasiswa Indonesia Timur, atau Beasiswa Bidikmisi.

Info selengkapnya:



FIKSI 2019

(Deadline: 31 Juli 2019)

Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) telah membuka pendaftaran mulai 1 Mei - 31 Juli 2019. Festival ini cocok bagi siswa SMA yang mempunyai minat dan bakat di bidang Inovasi Kewirausahaan.

Info selengkapnya:



Membangun budaya kerja di lingkungan Direktorat PSMA

Layanan pendidikan SMA ke depan diharapkan dapat melahirkan lulusan yang akan hidup di zaman baru. Zaman baru itu kita kenal bersama sebagai era industri 4.0. Era industri ini dicirikan dengan terintegrasinya perangkat otomatisasi dengan internet dengan semua aktivitas manusia.